

ANALISIS PELAKSANAAN PROGRAM BLT TERHADAP KEBUTUHAN RUMAH TANGGA MASYARAKAT NELAYAN DESA DENDUN

Galih Topati¹, Dimas Juliyanto², Sigit Maryanto³

Universitas Maritim Raja Ali Haji, Kota Tanjungpinang, Indonesia^{1,2,3}

E-Mail: galih.topati@gmail.com

ABSTRACT

This research aims to analyze the use of Direct Cash Transfer (BLT) in Dendun Village, especially among the fishing community. The BLT policy was implemented by the Dendun Village Government as an effort to help fulfill the needs of fishing households. In its implementation, the government set criteria for beneficiaries that had to be met so that the assistance could be allocated with the right target. This research used a qualitative method with data collection techniques through direct observation and interviews with the village head, village officials, RT heads, and BLT beneficiaries. The results showed that the Dendun Village Government allocated funds of Rp15,000,000 (fifteen million rupiah) that were disbursed monthly. This policy had a positive impact on the management of BLT funds, especially in fulfilling the basic needs of the fishing community. The successful implementation of the BLT program was influenced by effective communication between the village government and the community, optimal resources, disposition or positive attitudes from policy implementation and the village bureaucratic structure in Dendun Village which played a significant role in the successful implementation of the BLT program. The implications of this research emphasize the importance of an attitude of responsibility, openness, as well as commitment and honesty from the village head and the implementation team. Thus, the BLT program in Dendun Village ran well and provided real benefits for the fishing community, which tends to be vulnerable to income fluctuations.

Keywords: Direct Cash Assistance, Dendun Village, Fishermen Community

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penggunaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Dendun, khususnya di kalangan masyarakat nelayan. Kebijakan BLT diterapkan oleh Pemerintah Desa Dendun sebagai upaya membantu pemenuhan kebutuhan rumah tangga nelayan. Dalam implementasinya, pemerintah menetapkan kriteria penerima manfaat yang harus dipenuhi agar bantuan dapat dialokasikan dengan tepat sasaran. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi dan wawancara langsung dengan kepala desa, perangkat desa, ketua RT, serta masyarakat penerima BLT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Dendun mengalokasikan dana sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang dicairkan setiap bulan. Kebijakan ini memiliki dampak positif dalam pengelolaan dana BLT, terutama dalam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat

nelayan. Keberhasilan pelaksanaan program BLT dipengaruhi oleh komunikasi yang efektif antara pemerintah desa dan masyarakat, sumber daya yang optimal, disposisi atau sikap positif dari pelaksanaan kebijakan dan struktur birokrasi desa di Desa Dendun yang berperan signifikan dalam keberhasilan implementasi program BLT. Implikasi dari penelitian ini menegaskan pentingnya sikap tanggung jawab, keterbukaan, serta komitmen dan kejujuran dari kepala desa dan tim pelaksana. Dengan demikian, program BLT di Desa Dendun berjalan dengan baik dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat nelayan, yang cenderung rentan terhadap fluktuasi pendapatan.

Kata Kunci: Bantuan Langsung Tunai, Desa Dendun, Masyarakat Nelayan

PENDAHULUAN

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang telah ada secara turun-temurun dan bergantung pada sumber daya alam sekitarnya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Menurut Sugiman (2018) dan H.A.W. Widjaja, desa memiliki susunan asli yang istimewa serta berlandaskan prinsip keanekaragaman, otonomi, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah desa diberi wewenang luas untuk mengatur kepentingan masyarakatnya, termasuk dalam pembuatan kebijakan dan pengelolaan sumber daya demi kemajuan desa itu sendiri. Pemerintah pusat mengakui eksistensi dan peran penting desa dalam sistem pemerintahan Indonesia.

Perubahan besar dalam sistem pemerintahan desa dimulai sejak reformasi 1998 dan semakin signifikan sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-undang ini memberikan legitimasi politik kepada pemerintah desa dan menjadikannya lebih mandiri dalam pengelolaan anggaran dan pembangunan wilayahnya. Salah satu bentuk konkrit dari kebijakan ini adalah adanya Dana Desa yang bersumber dari APBN dan dialokasikan melalui APBD

ke setiap desa. Dana ini bertujuan untuk pemberdayaan masyarakat dan mengurangi kesenjangan antarwilayah, termasuk di bidang sosial, ekonomi, dan budaya.

Desa Dendun, yang terletak di Kabupaten Bintan, merupakan hasil pemekaran pada tahun 2008 dan telah menyelenggarakan pemilihan kepala desa secara langsung. Pemerintah desa memanfaatkan Dana Desa untuk membangun dan memajukan wilayahnya, dengan fokus pada pengembangan masyarakat, khususnya yang mayoritas bekerja sebagai nelayan. Ketidakpastian kondisi alam dan perubahan iklim telah menjadi tantangan serius bagi para nelayan, yang mengakibatkan ketidakstabilan penghasilan dan menurunnya kesejahteraan keluarga. Pemerintah desa pun perlu merespons persoalan ini dengan kebijakan yang mendukung ketahanan ekonomi masyarakatnya.

Salah satu bentuk respons tersebut adalah pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang bersumber dari Dana Desa. Pada tahun 2024, pemerintah Desa Dendun menyalurkan bantuan sebesar Rp300.000 per bulan kepada 50 kepala keluarga dengan total dana sebesar Rp15.000.000. Kebijakan ini dilandaskan pada peraturan Menteri

Keuangan dan instruksi Menteri Desa terkait percepatan penyaluran BLT. Program ini menjadi solusi jangka pendek untuk menstabilkan ekonomi rumah tangga nelayan di tengah tantangan perubahan iklim dan kondisi laut yang tidak menentu, sekaligus menjadi wujud nyata dari fungsi Dana Desa sebagai alat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

KAJIAN PUSTAKA

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) terhadap kebutuhan rumah tangga masyarakat nelayan di Desa Dendun. Fokus penelitian ini dilandasi oleh peran Dana Desa sebagai solusi atas kondisi darurat dan mendesak yang dihadapi masyarakat, khususnya nelayan, dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka sehari-hari. Untuk memperkuat konteks dan landasan teoritis, dilakukan peninjauan terhadap beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan tema BLT Dana Desa.

Penelitian oleh Tendean, F. C., Tamowangkay, V., & Wilar, W. (2023) membahas implementasi program BLT Dana Desa di Desa Kakenturan Barat yang terdampak pandemi Covid-19. Hasilnya menunjukkan pelaksanaan program berjalan cukup baik dan tepat sasaran, namun masih terdapat keluhan dari warga yang merasa tidak mendapat bantuan akibat isu politik lokal. Penelitian ini serupa dalam konteks kajian mengenai dana BLT, tetapi berbeda dalam fokus, karena penelitian tersebut lebih menyoroti dampak pandemi, sementara penelitian ini menitikberatkan pada kebutuhan rumah tangga nelayan di Desa Dendun.

Selanjutnya, penelitian oleh Indriani, I., Irianto, H., & Ratnawati, S. (2023) di Desa Sedatigede Sidoarjo mengkaji evaluasi penyaluran BLT-DD yang dinilai belum efektif. Masalah utama adalah tidak terselesaikannya keluhan masyarakat yang menyebabkan bantuan tidak dapat dicairkan secara rutin. Meskipun memiliki kesamaan dalam mengevaluasi efektivitas program BLT terhadap kesejahteraan masyarakat, penelitian ini berbeda karena fokusnya berada pada pelaksanaan dan seberapa jauh program BLT dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga nelayan di Desa Dendun, bukan pada efektivitas teknis penyaluran secara umum.

Terakhir, penelitian oleh Carly Erfly Fernando Maum mengangkat efektivitas BLT Dana Desa bagi masyarakat miskin terdampak Covid-19 di Desa Talaitad. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa pelaksanaan BLT telah berjalan dengan efektif. Walaupun memiliki fokus yang mirip mengenai pelaksanaan program BLT, perbedaan utamanya terletak pada subjek sasaran; penelitian ini secara khusus meneliti masyarakat nelayan di Desa Dendun, bukan masyarakat miskin secara umum. Dengan membandingkan ketiga penelitian tersebut, studi ini memperjelas posisi dan kontribusinya dalam kajian pelaksanaan BLT yang lebih kontekstual dan spesifik terhadap kebutuhan nelayan di tengah tantangan sosial-ekonomi mereka.

Penelitian ini kemudian menggunakan teori “Implementasi Kebijakan” oleh George C. Edward III. Dimana menurut George C. Edward III (2005), implementasi kebijakan dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu:

1. Komunikasi

2. Sumber Daya
3. Disposisi
4. Struktur Birokrasi

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menggali secara mendalam pelaksanaan program dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) terhadap kebutuhan rumah tangga masyarakat nelayan di Desa Dendun. Fokus penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan kebijakan pemerintah tersebut berjalan untuk membantu kebutuhan rumah tangga masyarakat nelayan di Desa Dendun. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yang melibatkan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Peneliti kemudian menerapkan teknik analisis data berupa analisis deskriptif kualitatif, yang terdiri dari reduksi data (data reduction), penyajian data (data display), dan penarikan kesimpulan (conclusion drawing). Di mana data dan informasi lapangan dikumpulkan dan disusun secara sistematis untuk dianalisis. Selanjutnya melakukan penafsiran dan penarikan kesimpulan untuk memberikan gambaran yang jelas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini melakukan evaluasi program Bantuan Langsung Tunai (BLT) terhadap kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat nelayan di Desa Dendun. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam efektivitas BLT dalam meningkatkan pendapatan, mengurangi ketimpangan, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Selain itu,

penelitian ini juga akan mengkaji implementasi program dari sisi perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan program BLT. Berdasarkan teori “Implementasi Kebijakan” oleh George C. Edward III, terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan keberhasilan program BLT.

1. Komunikasi Dalam Pelaksanaan Program BLT Di Desa Dendun

Komunikasi menjadi hal yang krusial dalam proses implementasi kebijakan. Dengan adanya komunikasi, informasi juga dapat tersampaikan dengan baik sehingga pelaksanaan kebijakan dapat berjalan dengan lancar. Komunikasi dan koordinasi yang baik mencegah terjadinya distorsi dan kebingungan antar pembuat kebijakan, pelaksana, dan masyarakat. Komunikasi menjadi kunci keberhasilan program BLT di Desa Dendun. Melalui komunikasi yang efektif, pemerintah desa dapat menyampaikan informasi terkait program secara jelas dan transparan kepada masyarakat. Diawali dengan sosialisasi kriteria penerima, mekanisme penyaluran, hingga tujuan dari program BLT itu sendiri. Selain itu, komunikasi dua arah juga memungkinkan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, masukan, atau kendala yang mereka hadapi terkait program BLT. Dengan demikian, pemerintah desa dapat merespon dengan cepat dan tepat, sehingga program BLT dapat berjalan lebih efektif dan memenuhi kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan berbagai pihak terkait, mulai dari kepala desa, perangkat desa, RT,

hingga masyarakat penerima manfaat, dapat disimpulkan bahwa komunikasi yang efektif berperan penting dalam setiap tahapan program. Sosialisasi yang jelas dan berjenjang menjadi fondasi utama. Komunikasi diawali dengan sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah desa kepada seluruh perangkat desa, RT, dan RW. Informasi mengenai kriteria penerima manfaat, persyaratan, dan mekanisme penyaluran disampaikan secara jelas dan rinci. Hal ini memungkinkan perangkat desa dan RT untuk menyampaikan informasi yang sama kepada masyarakat secara akurat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa “komunikasi” menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan program BLT di Desa Dendun.

2. Sumber Daya Dalam Pelaksanaan Program BLT Di Desa Dendun

Sumber daya dalam pelaksanaan Program BLT di Desa Dendun sangat penting. Sumber daya manusia, seperti perangkat desa dan relawan, berperan aktif dalam pendataan, verifikasi, dan penyaluran BLT. Sumber daya finansial dari anggaran desa dan bantuan pemerintah pusat menjadi modal utama dalam menjalankan program ini. Selain itu, sumber daya infrastruktur, seperti balai desa atau tempat umum lainnya, digunakan sebagai lokasi penyaluran BLT dan sosialisasi program. Ketersediaan data dan informasi yang akurat juga menjadi sumber daya penting untuk memastikan penyaluran BLT tepat sasaran dan transparan. Dengan demikian, optimalisasi penggunaan berbagai sumber daya ini akan menjamin keberhasilan pelaksanaan Program BLT di Desa Dendun dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan berbagai pihak terkait, mulai dari kepala desa, perangkat desa, RT, hingga masyarakat penerima manfaat, dapat disimpulkan bahwa program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Dendun telah memberikan dampak positif bagi masyarakat, terutama dalam memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari. Partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, mulai dari musyawarah desa hingga penentuan penerima manfaat, menjadi kunci keberhasilan program ini. Masyarakat merasa dilibatkan dan memiliki rasa memiliki terhadap program BLT.

Namun, terdapat beberapa kendala yang perlu diperhatikan. Jumlah bantuan yang diterima masih dianggap kurang mencukupi oleh sebagian masyarakat, terutama mengingat kenaikan harga kebutuhan pokok. Selain itu, program BLT belum secara signifikan meningkatkan kualitas sumber daya masyarakat, seperti alat tangkap ikan bagi nelayan. Oleh karena itu, perlu adanya evaluasi lebih lanjut dan pengembangan program yang lebih komprehensif untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, sehingga program BLT dapat memberikan manfaat yang lebih optimal bagi kesejahteraan masyarakat Desa Dendun.

3. Disposisi Dalam Pelaksanaan Program BLT Di Desa Dendun

Disposisi dalam implementasi kebijakan merujuk pada sikap, komitmen, serta kesediaan pihak pelaksana kebijakan untuk menjalankan program sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Dalam konteks pelaksanaan program BLT di Desa Dendun, disposisi dari kepala desa, perangkat desa, serta RT, menunjukkan peran krusial dalam

memastikan program dapat berjalan efektif dan tepat sasaran. Berdasarkan hasil wawancara, disposisi para pelaksana kebijakan dalam program BLT di Desa Dendun, mulai dari kepala desa, perangkat desa, hingga RT, memiliki komitmen tinggi, kepekaan, dan tanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan masyarakat nelayan. Kepala desa memiliki visi jelas untuk meningkatkan kesejahteraan warga, tidak hanya melalui program BLT tetapi juga dengan merencanakan program ketahanan pangan berkelanjutan. Perangkat desa dan RT berperan aktif dalam memastikan transparansi data, penyaluran bantuan yang tepat sasaran, serta responsif terhadap aspirasi masyarakat. RT, sebagai penghubung antara pemerintah desa dan warga, turut berfokus pada akurasi data penerima dan mendorong perbaikan sosialisasi program. Sementara itu, masyarakat penerima manfaat merasa terbantu dan berharap program ini lebih tepat sasaran dan signifikan dalam meringankan beban ekonomi.

Implikasi temuan ini menegaskan bahwa disposisi positif dari kepala desa dan jajarannya, yang mengutamakan transparansi, akuntabilitas, dan responsivitas, berperan penting dalam keberhasilan implementasi BLT. Dengan dedikasi dan integritas yang ditunjukkan, program ini dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat nelayan yang rentan terhadap fluktuasi pendapatan.

4. Struktur Birokrasi Dalam Pelaksanaan Program BLT Di Desa Dendun

Struktur birokrasi dalam pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Dendun

memegang peranan yang sangat krusial dalam menjamin keberhasilan program tersebut. Struktur birokrasi yang dimaksud mencakup berbagai elemen pemerintahan desa, seperti kepala desa, perangkat desa, hingga rukun tetangga (RT) yang berperan langsung dalam proses administrasi dan teknis di lapangan. Mereka menjadi ujung tombak dalam menyusun perencanaan, melakukan pendataan, verifikasi penerima manfaat, hingga menyalurkan bantuan kepada masyarakat. Keterlibatan aktif dan koordinasi yang baik antarperangkat desa menjadi fondasi penting dalam memastikan bahwa program BLT berjalan secara efektif dan efisien.

Dana yang digunakan dalam program BLT bersumber dari Dana Desa (DD), yaitu alokasi anggaran dari pemerintah pusat yang bertujuan untuk mempercepat pembangunan desa serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dana ini menjadi salah satu instrumen utama dalam mengurangi kesenjangan ekonomi dan membantu masyarakat desa, khususnya kelompok rentan seperti nelayan, agar mampu memenuhi kebutuhan dasar mereka. Oleh karena itu, tata kelola birokrasi desa harus mampu menjamin bahwa setiap proses yang berkaitan dengan penggunaan dana tersebut dilakukan secara akuntabel dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ketepatan dalam administrasi dan integritas dalam pengambilan keputusan menjadi kunci agar program ini dapat mencapai tujuannya secara maksimal.

Salah satu aspek penting dalam pelaksanaan BLT adalah ketersediaan data yang valid dan mutakhir mengenai calon penerima bantuan. Proses pendataan harus dilakukan dengan

cermat dan melibatkan partisipasi aktif masyarakat guna meminimalkan potensi kesalahan atau manipulasi data. Struktur birokrasi desa bertanggung jawab memastikan bahwa verifikasi terhadap data penerima dilakukan secara transparan dan sesuai kriteria yang telah ditetapkan oleh pemerintah, seperti tingkat pendapatan, jumlah tanggungan keluarga, dan dampak ekonomi yang dialami. Keakuratan data ini tidak hanya menentukan efektivitas penyaluran bantuan, tetapi juga menjadi alat ukur keadilan dalam distribusi bantuan sosial.

Dengan demikian, optimalisasi struktur birokrasi di tingkat desa tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana administratif, tetapi juga sebagai pengawal nilai-nilai keadilan sosial, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan Program BLT. Ketika birokrasi desa mampu bekerja secara profesional, terbuka, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, maka program BLT akan berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan: yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mendorong ketahanan ekonomi keluarga miskin, dan menciptakan kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah desa. Hal ini menjadi sangat penting, terutama dalam konteks desa seperti Dendun, di mana mayoritas penduduknya bergantung pada sektor informal seperti perikanan yang sangat rentan terhadap fluktuasi ekonomi dan perubahan iklim.

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak kebijakan pemerintah desa dalam pengelolaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) terhadap penanganan kemiskinan di

Desa Dendun, Kecamatan Mantang, Kabupaten Bintan, tahun 2024. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan observasi langsung di lapangan. Wawancara dilakukan kepada kepala desa, perangkat desa, RT, dan masyarakat penerima BLT, sementara observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung proses implementasi, distribusi, serta dinamika sosial yang terjadi dalam pelaksanaan program BLT.

Melalui hasil observasi, ditemukan bahwa proses distribusi BLT di Desa Dendun berjalan transparan dan akuntabel. Tim pelaksana terlihat aktif dalam memastikan bantuan diterima tepat sasaran, serta mendokumentasikan setiap tahap distribusi dengan baik. Observasi juga menunjukkan adanya keterlibatan aktif dari perangkat desa dan RT dalam memantau penerima manfaat dan kondisi ekonomi rumah tangga nelayan, sehingga data yang digunakan lebih akurat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, komunikasi yang efektif menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan program BLT. Penyampaian informasi yang jelas mengenai kriteria penerima, mekanisme distribusi, dan tujuan program memungkinkan pelaksanaan kebijakan berjalan lancar. Komunikasi dua arah antara pemerintah desa dan masyarakat juga membantu mengidentifikasi kendala serta memberikan ruang bagi warga untuk menyampaikan aspirasi dan masukan. Disposisi atau sikap positif dari para pelaksana kebijakan, termasuk kepala desa, perangkat desa, dan RT, memainkan peran penting dalam

kesuksesan program. Kepala desa menunjukkan komitmen kuat dan visi yang jelas untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tidak hanya melalui program BLT tetapi juga melalui rencana program ketahanan pangan berkelanjutan. Perangkat desa dan RT turut berperan aktif dalam memastikan transparansi data, penyaluran bantuan yang tepat sasaran, serta sosialisasi yang efektif.

Keberhasilan pelaksanaan program BLT juga sangat dipengaruhi oleh pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya secara optimal. Sumber daya manusia di Desa Dendun merupakan salah satu kekuatan utama. Perangkat desa, RT, dan tim pelaksana BLT memiliki pemahaman mendalam tentang kondisi sosial-ekonomi masyarakat desa, khususnya rumah tangga nelayan yang menjadi salah satu kelompok rentan. Pengetahuan ini menjadi dasar bagi pelaksanaan kebijakan yang lebih terarah dan tepat sasaran. Dalam aspek sumber daya finansial, pengelolaan dana BLT dilakukan dengan prinsip akuntabilitas yang tinggi. Pemerintah desa mendokumentasikan setiap tahapan distribusi secara rinci, mulai dari penyaluran hingga pelaporan, untuk meminimalkan risiko penyimpangan anggaran. Kebijakan ini tidak hanya meningkatkan transparansi, tetapi juga membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.

Struktur birokrasi desa di Desa Dendun berperan signifikan dalam keberhasilan implementasi program BLT. Struktur ini memiliki ciri-ciri yang relatif sederhana tetapi fungsional, memungkinkan komunikasi dan koordinasi yang cepat antar tingkat pemerintahan desa. Kepala desa,

sebagai pemimpin tertinggi di desa, memainkan peran sentral dalam mengarahkan kebijakan, termasuk memastikan BLT dikelola secara akuntabel. Perangkat desa dan RT berperan sebagai pelaksana penting dalam pelaksanaan teknis program. Perangkat desa dan RT bertugas mendata calon penerima manfaat, melakukan verifikasi, dan menyampaikan laporan distribusi bantuan. Tingkat keterlibatan perangkat desa yang tinggi, serta hubungan kerja yang baik dengan kepala desa, menciptakan sinergi yang efektif dalam pelaksanaan program. Selain itu, ketiadaan kompleksitas hierarki dalam birokrasi desa mempercepat proses pengambilan keputusan, terutama saat menghadapi kendala atau perubahan kebijakan yang membutuhkan respons cepat.

Hasil observasi juga memperkuat temuan bahwa masyarakat penerima manfaat merasakan dampak positif program BLT, terutama dalam membantu meringankan beban ekonomi rumah tangga nelayan yang rentan terhadap fluktuasi pendapatan. Namun, masih terdapat harapan agar program ini lebih tepat sasaran dan memberikan dampak yang lebih signifikan. Implikasi dari penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi program BLT sangat bergantung pada transparansi, akuntabilitas, responsivitas para pelaksana kebijakan, serta pengelolaan sumber daya dan efisiensi struktur birokrasi. Dengan sikap keterbukaan, integritas, dan komitmen yang tinggi, program BLT di Desa Dendun mampu memberikan manfaat nyata dan membantu upaya pengentasan kemiskinan di kalangan masyarakat nelayan. Optimalisasi peran

struktur birokrasi desa dan pemanfaatan sumber daya yang tersedia secara efektif menjadi elemen penting dalam menciptakan keberlanjutan dan dampak positif yang lebih luas dari program ini.

DAFTAR PUSTAKA

Kutipan dari Buku

- Huberman & Miles, M.B. (1984). *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Pendidikan Indonesia.
- Salim & Syahrur. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Citapustaka Media.
- Samnuzulsari, T. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif (W. E. Yudiatmaja (Ed.))*. Tanjungpinang: UMRH Press.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Widjaja, HAW. (2003). *Otonomi Desa*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Winarno Budi. (2012). *Kebijakan Publik (Teori, Proses, Dan Studi Kasus)*. Yogyakarta: CAPS.

Kutipan dari Jurnal

- Indriani, I., Irianto, H., & Ratnawati, S. (2023). Evaluasi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di Sedatigede Sidoarjo: *Jurnal Ilmiah Muqoddimah* 7 (3).
- Maun, C. E. (2020). Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi Masyarakat Miskin Terkena Dampak Covid-19 Di Desa Talaitad Kecamatan Suluun Tareran Kabupaten

Minahasa Selatan: *Politico Jurnal Ilmu Politik* 9 (2).

- Putra, M. D. (2021). Negara Kesejahteraan (Welfare State) Dalam Perspektif Pancasila: *Likhitaprajna* 23 (2), 139-151.
- Sugiman. (2018). Pemerintahan Desa: *Binamulia Hukum* 7 (1), 82-95.
- Sugiri, D. (2021). Penyaluran Dan Penggunaan Dana Desa Dalam Masa Pandemi Covid-19: *Akbis Media Riset Akuntansi dan Bisnis* 5 (2), 130-137.
- Tendean, F. C., Tamowangkay, V., & Wilar, W. (2023). Implementasi Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi Masyarakat Yang Terdampak Pandemi Covid-19 Di Desa Kakenturan Barat Kecamatan Modinding Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2021: *Jurnal Eksekutif* 3 (1).
- Wahyono, A. (2018). Ketahanan Sosial Nelayan: Upaya Merumuskan Indikator Kerentanan (Vulnerability) Terkait Dengan Bencana Perubahan Iklim: *Masyarakat Indonesia* 42 (2), 185-199.

Kutipan dari Dokumen Pemerintah

- UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Presiden Republik Indonesia. 15 Januari.
- PP No. 39 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Presiden Republik Indonesia. 5 Maret.
- PMK No. 50/PMK.07/2020 Tentang Pengelolaan Dana Desa. Menteri Keuangan Republik Indonesia. 19 Mei.